



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN PEDAGANG
KAKI LIMA DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

INES AMALIA DINATA

11720525309

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1442 H / 2021 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan berjudul “**Strategi Pemerintah Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Menurut Prespektif Syariah**” yang ditulis oleh :

Nama : Ines Amalia Dinata

NIM : 11720525309

Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam siding Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Sarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juni 2021
Pembimbing Skripsi

Dr. Nurnasrina, SE, M.Si

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”,**

yang ditulis oleh:

Nama : Ines Amalia Dinata
 NIM : 11720525309
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 30 Juni 2021
 Tempat : Daring / Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Maghfirah, M.Ag

Sekretaris

Madona Khairunnisa, S.E.I., M.E.Sy

Penguji I

Muhammad Nurwahid, M.Ag

Penguji II

Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ines Amalia Dinata (2021) : “ Strategi Pemerintah Dalam Penertiban Pedagang Kaki lima Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Menurut Prespektif Ekonomi Syariah”.

Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya pedagang kaki lima(PKL) yang menggunakan trotoar dan jalan sebagai tempat berdagang yang membahayakan keselamatan jiwanya sendiri dan juga bagi pengguna jalan yang menggunakan kendaraan di Kota Pekanbaru khususnya di Jl, Tobek Gadang. Sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas, mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan mengganggu keindahan kota. Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana pelaksanaan penertiban kegiatan usaha pedagang kaki lima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah dalam penertiban usaha pedagang kaki lima di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah tentang pelaksanaan serta penertiban usaha pedagang kaki lima menurut ekonomi syariah, di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Populasi dari peneltian ini berjumlah 21 (PKL) yang berada di Jl.Tobek Gadang karna pada lokasi ini paling banyak pedagang kaki lima yang berjualan disana dengan teknik *total sampling*. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, wawancara dan angket. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dalam menganalisis data menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini di ketahui bahwa pelaksanaan penertiban kegiatan usaha pedagang kaki lima di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yaitu Satuan Pamong Praja (Satpol PP) terlebih dahulu dengan adanya perencanaan, pengelompokkan, pergerakan atau pengarahan ,pengawasan dan evaluasi atau tindakan. Strategi yang di lakukan pemerintah dalam penertiban usaha pedagang kaki lima yaitu melalui pembinaan, penertiban dan sanksi. Tinjauan ekonomi syariah tentang pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima sudah sesuai dengan syriat Islam karena Pemerintah merupakan pelayan, pelindung dan pengayom bagi masyarakat serta dituntut bersikap baik dan lembut dalam melayani kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya, namun perlu disiplinkan dalam aspek pengawasan bagi (PKL) yang tidak mematuhi aturan yang berlaku.

Kata Kunci : PKL, Penertiban, Satpol PP



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN USAHA PEDEGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU”**. Selanjutnya shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau. Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Kepada Kedua orang tua, ayah tercinta Irwan Karta Dinata dan ibu terkasih Uun Kurniasih yang selalu menjadi sumber motivasi bagi penulis dan senantiasa mendo'akan agar penulis selalu bersemangat dalam menuntut ilmu.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Prof. Dr. KH Akhmad Mujahidin, S.Ag selaku penasehat Akademis Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Dr.Nurnasrina, SE, M.Si, Selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini sampai selesai.
7. Kepada Kakak Nur Ayuni Anggari Putri S.Pd, Kiky Dayang Juwita A.Md.Kep dan Adek Wulan Asmaida Dinata yang selalu memberikan dukungan semangat dan motivasi yang tiada henti sehingga penulis bersemangat untuk meraih cita-cita.
8. Kepada keluarga besar Fakultas Syariah dan Hukum dan segenap dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dimasa perkuliahan semoga sukses selalu.
9. Kepada Teman seperjuangan yaitu Linda, Risa, dan Lady yang selalu memberi semangat tiada henti canda tawa diantara kita akan selalu penulis kenang,semoga kita menjadi wanita-wanita yang sukses.
10. Seluruh teman-teman Lokal G yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
11. Dan seluruh pihak yang membantu dalam penulisan ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis mendoakan semoga seluruh bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah bagi mereka dan diridhai oleh Allah Swt. Aamiin yaa rabbal'amin.

Pekanbaru, 04 Juni 2021

Penulis

Ines Amalia Dinata
Nim: 11720525309



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU	
DAN SATUAN PAMONG PRAJA (SATPOL PP).....	16
A. Gambaran Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	16
1. Keadaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	16
2. Visi Misi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	19
3. Struktur Organisasi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Gambaran Umum Satuan Pamong Praja (Satpol PP)	22
1. Sejarah Pembentukan Satuan Pamong Praja (Satpol PP)	22
2. Visi Misi Satuan Pamong Praja (Satpol PP)	24
BAB III LANDASAN TEORI	26
A. Strategi	26
1. Pengertian Strategi	26
2. Jenis – Jenis Strategi	28
3. Strategi Dalam Tinjauan Islam	29
B. Pedagang Kaki Lima (PKL)	34
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)	34
2. Jenis – Jenis Dan Tempat Pedagang Kaki Lima (PKL)	36
3. Peran Pemerintah Dalam Kebijakan Ekonomi Dalam Presfektif	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Pelaksanaan Penertiban Kegiatan Pedagang Kaki Lima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	45
B. Strategi Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Dikecamatan Tampan Kota Pekanbaru	48
C. Tinjauan Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Tanggapan Pedagang Kaki Lima Tentang Strategi Pemerintah	50
Tabel IV.2	Keadaan Strategi Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah (Satpol PP)	51
Tabel IV.3	Tata Cara Pemerintah Kota Dalam Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima	52
Tabel IV.4	Keadaan Pelaksanaan Pemberian Sanksi Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Dianggap Tidak Tertib dan Teratur.....	53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	21
Gambar IV.2 Skema Pelaksanaan Penertiban Kegiatan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Pamong Praja (Satpol PP).....	48





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia sebagai makhluk hidup dimuka bumi ini, pada dasarnya terus berusaha guna memenuhi kebutuhan dasar hidup yang menjadi syarat utama demi memelihara keberlangsungan dalam kehidupannya. Berbagai pekerjaan berupa aktivitas manusia, terus dilakukan setiap anggota masyarakat demi mendapatkan penghasilan agar dapat menunjang perekonomian keluarga dengan tujuan utama demi memenuhi kebutuhan hidup. Namun pada kenyataannya, tidak semudah itu setiap masyarakat dapat memiliki pekerjaan yang berasal dari sektor formal. Melihat kondisi sulitnya mencari lapangan pekerjaan pada sektor formal yang ada pada saat ini, menjadikan warga masyarakat yang belum memiliki pekerjaan berfikir untuk beralih ke sektor informal dan salah satunya adalah menjadi pedagang kaki lima. Berdagang merupakan salah satu usaha konkret yang dapat dilakukan oleh manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

Pedagang kaki lima ini muncul akibat dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam mewujudkan keproduktifitasan dalam kehidupannya. Fenomena mengenai keberadaan pedagang kaki lima sudah tidak asing lagi didengar. Di setiap sudut perkotaan banyak ditemui pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahannya terletak pada tidak selamanya keberadaan pedagang kaki lima membawa dampak yang baik.

Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki posisi strategis dalam pengembangan sektor ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Kegiatan usaha PKL juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, diantaranya; kelancaran lalu lintas, kebersihan, keindahan dan ketertiban. Sehubungan dengan itu, keberadaan PKL dan aktivitas perdagangannya perlu ditata, dikelola dan diberdayakan oleh pemerintah daerah.

Kebijakan pemerintah daerah dalam menata PKL bertujuan untuk menciptakan suasana tempat usaha PKL yang tertib, bersih, indah, nyaman dan aman. Sehingga, proses perdagangan PKL bisa berjalan lancar tanpa harus mengganggu kelancaran lalu lintas, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penataan ruang perkotaan.

Pedagang kaki lima adalah salah satu jenis kegiatan informal. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 11 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan barang dan atau jasa dengan menggunakan sarana usaha bergerak dan tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

lahan, dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara /tidak tetap.¹

Pedagang kaki lima merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sulitnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi anggota masyarakat yang berpendidikan rendah dengan pengalaman serta keterampilan yang sangat terbatas.² Usaha kecil menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan keseharian masyarakat di Indonesia maupun di belahan dunia pada umumnya. Usaha kecil sangat menunjang kemudahan hidup konsumen Indonesia dan berpengaruh sangat besar terhadap penciptaan lapangan kerja juga peningkatan pertumbuhan perekonomian suatu negara.³

Keberadaan PKL selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan baru. Kegiatan para PKL dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum. Seperti kegiatan pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang, yang membahayakan keselamatan jiwanya sendiri dan juga bagi pengguna jalan yang menggunakan kendaraan. pemasangan reklame yang sembarangan. Gangguan terhadap kelancaran jalan arus lalu lintas semakin bertambah ketika pengendara/pengemudi melakukan pembelian sesuatu barang yang dijajakan

¹ UU Peraturan Wali Kota Pekanbaru, Nomor 11 Tahun 2015 , Tentang Peraturan Dan Perbedayaan Pedagang Kaki Lima .

²Khairina Afriani Candra Dewi, *Strategi Bisnis pada Pedagang Kaki Lima (pkl) di Taman Bungkul Surabaya (studi kasus pedagang kaki lima (pkl) di taman bungkul, surabaya)*, hlm. 4.

³Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : Erlangga, 1996), hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh PKL, sehingga mengganggu kenyamanan pejalan kaki, dan mengganggu keindahan tata kota. Keadaan ini sering terjadi di Jl. Tobek Gadang, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang buah bernama bapak Umar yang sudah 2 tahun berjualan menerangkan bahwa selama ini penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP sudah berjalan dengan baik dan benar, PKL mengetahui dengan jelas resiko yang tinggi jika terjaring razia penertiban oleh Satpol PP . Tetapi karena faktor ekonomi masyarakat terutama PKL yang rendah membuat PKL tidak mampu untuk berjualan ditempat yang ditentukan karena biaya sewa tempat atau pasar yang mahal.⁴

Untuk mengatasi permasalahan tersebut,dalam perda ini terdapat pasal mengenai larangan PKL untuk berjualan di tempat-tempat tertentu. yaitu pasal 2 No 5 Tahun 2002 menyebutkan yaitu: ⁵

1. Dilarang mengotori dan merusak jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum,membuka/memindahkan atau merusak atau melanggar tanda-tanda rambu-rambulalu lintas, kecuali oleh petugas yang ditunjuk oleh walikota untuk kepentingandinas.
2. Dilarang membuang sampah sampah atau menumpuk kotoran/sampah, dijalan,jalur hijau, taman dan tempat umum.

⁴ Pak Umar, Pedagang Buah, (Wawancara), Pekanbaru, Pada Tanggal 30 Oktober 2020

⁵ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 5 Tahun 2002 Tentang *Program Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima* .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dilarang membakar kotoran/sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum

Dalam melaksanakan kewenangan guna menegakkan Peraturan Daerah, maka tugas ini diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah aparat Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.⁶

Polisi Pamong Praja harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru Polisi Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.⁷

⁶Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang *Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja*.

Pasal 1

⁷Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*, Pasal 255.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha untuk menertibkan PKL tentunya perlu mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak,

terutama PKL karena jika mereka diberikan pemahaman yang baik, memberikan jaminan kepastian usaha dan memfasilitasi agar usaha yang mereka rintis dapat berkelanjutan maka mereka akan mentaati perda. Artinya upaya untuk menertibkan para PKL yang ada di Kecamatan Tampan sesuai dengan Perda tersebut, pemda melibatkan masyarakat terutama para PKL yang akan ditertibkan. Pemerintah tidak langsung menggunakan otoritasnya dengan menggusur secara paksa para PKL.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU MENURUT PRESFEKTIF EKONOMI SYARIAH”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini sesuai tujuan utama penelitian ini dilakukan dan untuk menghindari meluasnya pembahasan maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini adalah Strategi pemerintah dalam penertiban usaha pedagang kaki lima di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pelaksanaan penertiban kegiatan pedagang kaki lima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan Pemerintah dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Syariah tentang pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima menurut ekonomi Syariah, di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan penertiban kegiatan pedagang kaki lima di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan Pemerintah dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Syariah tentang pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima menurut ekonomi Syariah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
2. Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan informasi dan ilmu dalam dunia akademis untuk para kaum-kaum intelektual dalam mengkaji dan menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana Strategi pemerintah dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru menurut prespektif ekonomi Islam, khususnya bagi bagi mahasiswa jurusan ekonomi Islam.

c. Bagi Praktisi

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan informasi tentang Strategi pemerintah dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru menurut prespektif ekonomi Syariah.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Jl. Tobek Gadang Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Lokasi ini dipilih karna paling banyak pedagang kaki lima yang berjualan di Jl. Tobek Gadang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Satpol PP Kota Pekanbaru. Dan objek dari penelitian ini adalah Strategi Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber dari Pemerintah Kota Pekanbaru.⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku , *website*, jurnal, yang berupa teori-teori maupun konsep yang dapat digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian.⁹

4. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Kec. Tampan Kota Pekanbaru, ada tiga jalan yaitu Jl. Delima, Jl. Tuah Karya dan Jl. Tobek Gadang. Karna Jumlah populasi banyak maka hanya mewakili satu yaitu Jl. Tobek Gadang yang berjumlah 21 Orang (PKL). Mengingat populasinya terbatas, maka seluruh populasi dijadikan sample dengan menggunakan teknik total sampling.¹⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data bagi penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

⁸ Ade Ismayani, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh : Syiah Kuala Un Express, 2014), hlm

⁹ *Ibid*, hlm 66

¹⁰ Jonathan Sarwono, *Pintar Menulis Ilmiah*, (Pekanbaru : Penerbit Andi 2013), hlm. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian. Bentuk pengamatan yang dilakukan penulis adalah secara langsung.¹¹
- b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggali dan menemukan informasi secara langsung. Metode wawancara (Interview) adalah bertanya secara lisan kepada informan untuk mendapatkan jawaban atau keterangan, dalam hal ini pertanyaan secara lisan yang diajukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain mau memberikan jawaban atau keterangan dari pertanyaan tersebut.¹² Dengan demikian, untuk memperoleh data yang akurat tentang objek dan sasaran penelitian, maka penulis melakukan wawancara dengan Narasumber dari Pemerintah Kota Pekanbaru.
- c. Angket yaitu penulis membuat daftar pertanyaan secara tertulis dengan memberi jawaban alternative untuk setiap pertanyaan, kemudian di sebarakan kepada Pedagang Kaki Lima yang menjadi subjek penelitian yang diteliti.

6. Analisa Data

Setelah data dikumpulkan kemudian di olah dan dianalisa dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga

¹¹Hashyim Hasanah, *Teknik-Teknik Observasi*, Jurnal at-Taquaddum Vol. 8(1), 2016, hlm 26.

¹²Darmansyah, *Morfologi dan Sintaksis Bahasa Bedayuh*, (Jakarta : Depdikbud, 1994), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.¹³

7. Metode Penelitian

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Metode deduktif, yaitu mengemukakan persoalan-perseolan secara umum, kemudian diuraikan lalu diambil kesimpulan khusus.
- b. Metode induktif, yaitu membahas masalah yang dimulai dari keterangan yang bersifat khusus, lalu diambil kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan dengan apa adanya dari fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan penelitian. Kemudian dianalisa dari data yang ada untuk dijadikan kesimpulan sebagai kesimpulan hukum.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Indah Istikarini (Mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang) yang dilakukan pada tahun 2005 dengan judul skripsi yaitu “Implementasi perda no.1 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pkh dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan pkh di kota malang.” Hasil dari penelitian tersebut adalah upaya peningkatan kesejahteraan pkh di kota Malang sesuai dengan peraturan perda no.1 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima, dengan mengatur lokasi yang telah ditentukan, mengarahkan PKL untuk

¹³AlbiAnggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Jejak Publisher, 2018), hlm. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui, memperhatikan kawasan bebas PKL, dan mengadakan pembinaan yang berkesinambungan. Dan dari hasil penelitian kebijakan yang telah dibuat ini dianggap tepat dan strategis dan membuat pengunjung banyak yang berdatangan kesana sehingga hal ini membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan pedagang kaki lima. Bedanya fokus peneliti adalah strategi pemerintah khususnya Dinas perindustrian dan perdagangan dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima.

2. Penelitian Cicik Triwulan (Mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang) yang dilakukan pada tahun 2008 dengan judul skripsi yaitu “implementasi Perda No.5 Tahun 2005 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Mojokerto.” Hasil dari penelitian Cicik Triwulan hampir sama dengan peneliti, hanya saja penelitian yang dilakukan lebih pada penertiban PKL dan hambatan pemerintah dalam merelokasi. Sedangkan fokus peneliti pada strategi peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima berbasis wisata kuliner di Kota Blitar.

3. Penelitian Fransisco Galih Pratama (Mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang) yang dilakukan pada tahun 2011 dengan judul skripsi yaitu “Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (studi bidang perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri).” Penelitian yang dilakukan oleh Fransisco Galih Pratama memiliki persamaan dengan peneliti,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya saja penelitian tersebut lebih terfokus pada kebijakan relokasi. Sedangkan peneliti lebih ke bentuk pada strategi pemerintah meningkatkan kesejahteraan PKL berbasis wisata kuliner.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh pembahasan yang lebih mengarah dalam skripsi ini, penulis bagi menjadi lima bab, tiap bab terdiri dari sub-sub bab, satu dengan yang lain saling berkaitan sehingga menjadi satu ke satuan yang utuh sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang berisi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Penelitian Terdahulu Sistematika Penelitian.

Bab II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan gambaran umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Visi misi Kecamatan Tampan, Struktur organisasi, Sejarah pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Visi misi Satuan Pamong Praja (Satpol PP).

Bab III : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan membahas teori meliputi: Strategi, jenis-jenis strategi, strategi dalam islam dan Pedagang kaki lima (PKL),

¹⁴ <http://eprints.umm.ac.id/46319/3/BAB%20II.pdf> , di Akses Pada Tanggal 10 Febuari 2011

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis-jenis dan PKL, PKL dalam ekonomi Islam, peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi dalam perspektif Islam.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas hasil penelitian tentang Pelaksanaan penertiban kegiatan pedagang kaki lima di Kecamatan Tampan Pekanbaru, Strategi yang dilakukan Pemerintah dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Tampan Pekanbaru dan Tinjauan Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Tampan Pekanbaru.

Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan dan hasil penelitian dan memberikan saran.



BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU DAN SATUAN PAMONG PRAJA (SATPOL PP)

A. Gambaran Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

1. Keadaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP.NO.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah ± 199.792 km². Kecamatan Tampan merupakan daerah bertopografi datar dengan letak geografis antara 0042' - 0050' Lintang Utara dan Antara 101035'- 101043' Bujur Timur. Kecamatan Tampan terbentuk dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten kampar yaitu, Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar, Desa Sidomulyo Barat , Desa Labuh Baru dan Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu.

Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, terdiri atas 131 RW dan 574 RT. Luas wilayah Kecamatan Tampan adalah 59,81 km² dengan Jumlah 9 Kelurahan Yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Delima, Kelurahan Tuah Madani, Kelurahan Sialang Munggu, Kelurahan Tobek Godang, Kelurahan Bina Widya dan Kelurahan Air Putih.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda NO. 03 Tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan di mekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah utara bebatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki dan sebelah selatan bebatasan dengan Kabupaten Kampar. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka di bentuklah Kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.4 Tahun 2016 menjadi 9 Kelurahan.

Batas-batas wilayah Kecamatan Tampan adalah Sebelah timur: berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai, Sebelah barat: berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Sebelah utara: berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki, Sebelah selatan: berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Jumlah penduduk Kecamatan Tampan mencapai 287.801 jiwa pada tahun 2017. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 6,96 persen dari tahun 2016. Kepadatan penduduknya mencapai 4.811 jiwa/km² dengan keadaan social nya sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pendidikan

Pendidikan di Kecamatan Tampan disajikan mengenai data pendidikan meliputi TK 75 sekolah, SD Negeri 21 sekolah dan SD swasta 32 sekolah,, SMP Negeri 4 sekolah dan SMP Swasta 19 sekolah serta SMA Negeri 2 sekolah dan SMA Swasta 9 sekolah.

ada juga SMK dengan SMK negeri 2 sekolah dan SMK swasta 16 sekolah.

2. Tempat ibadah

Data dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2017 di Kecamatan Tampan terdapat 326 tempat ibadah, baik itu masjid, surau/mushalla, gereja, dan vihara/kelenteng.

3. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Banyaknya tenaga kerja kesehatan menurut kelurahan di kecamatan tampan adalah dokter sebanyak 53 orang,mantri atau perawat sebanyak 49 orang,bidan 64 orang dan tenaga kesehatan lainnya sebanyak 62orang.

Kecamatan Tampan juga memiliki beberapa potensi untuk memajukan kehidupan yaitu diantaranya SDA yang dimiliki seperti pertanian dan peternakan, industry kecil maupun industry besar serta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu unsur peningkatan perekonomian suatu daerah adalah sarana perekonomian daerah tersebut, yang mana pada tahun 2016 jumlah sarana perekonomian di Kecamatan Tampan mengalami penambahan dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat contohnya dari jumlah pasar rakyat, pada tahun 2015 terdapat 3 pasar rakyat di Kecamatan Tampan, pada tahun 2016.

jumlahnya meningkat cukup pesat menjadi 11 pasar. Begitu pula dengan sarana perekonomian jenis Bank/Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang pada tahun 2015 berjumlah sebanyak 28 meningkat menjadi 29 bank di tahun 2016 dan perkembangan perkembangan perekonomian lainnya.

2. Visi Misi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Kota

Adapun Visi Misi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Kota adalah:

a. Visi

"Terwujudnya masyarakat informasi yang sejahtera melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dalam kerangka keutuhan dan kebersamaan di Kota Pekanbaru."

b. Misi

Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi.
Meningkatkan daya jangkau infrastruktur komunikasi dan informatika



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi.

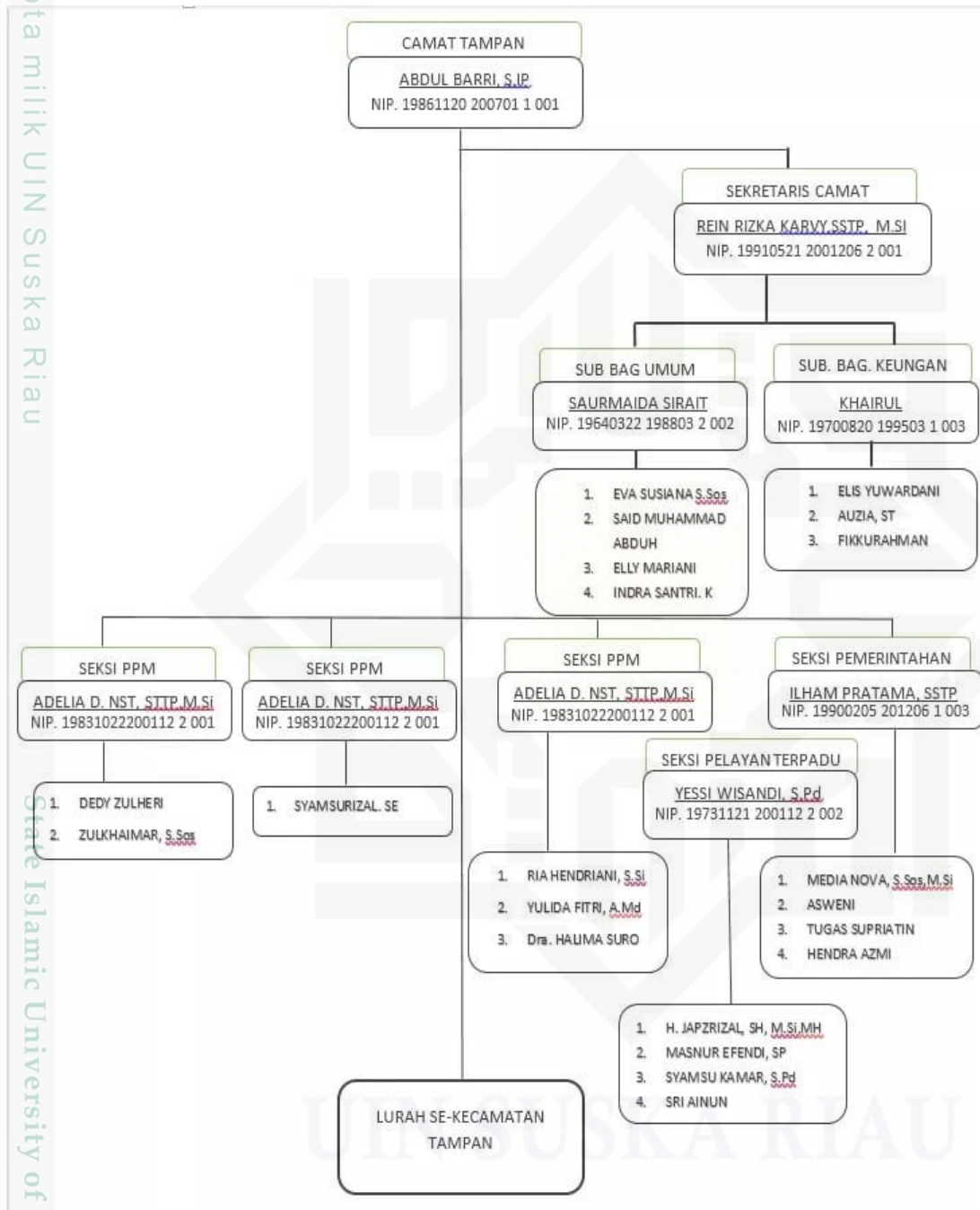
3. Struktur Organisasi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Dalam suatu organisasi, perlu adanya struktur organisasi jelas yang dapat diartikan sebagai suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan organisasi, agar setiap yang dicita-citakan organisasi yang telah ditetapkan dalam organisasi dapat dicapai dengan semaksimal mungkin dan memperoleh suatu hasil yang sangat membanggakan serta memuaskan. Struktur organisasi juga merupakan suatu gambaran skematis yang ditunjukkan oleh garis-garis menurut kedudukan atau jenjang yang telah ditentukan, sehingga dengan adanya struktur organisasi dapat mencerminkan hubungan-hubungan kerja antar tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing orang atau bagian dalam organisasi.

Dengan demikian, pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, karena apa yang dikerjakan telah tergambar dalam struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan suatu aturan yang mengatur pembagian tugas pegawai, sehingga pegawai yang terstruktur dalam organisasi dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Disisi lain, dengan adanya struktur organisasi tersebut, seorang pemimpin akan mudah mengetahui dan mengontrol bawahannya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah diamanahkan.

Gambar II.1

Struktur Organisasi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Gambaran Umum Satuan Pamong Praja (Satpol PP)

1. Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota. Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas Pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pada Tahun 1960 dimulai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Jawa dan Maduradengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi.

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau No. 34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Riau No. 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Provinsi Riau yang dahulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

2. Visi Misi Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

1. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang – undangan sehingga terselenggara sendi – sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
2. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
3. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bernegara terdapat ketentuan – ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

b. Misi

Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Istilah strategi berasal dari kata Yunani *strategoia* (*stratus* = militer dan *ag* = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi jenderal. Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dulu yang sering diwarnai perang, dimana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat selalu memenangkan perang. Konsep strategi militer seringkali diadaptasi dan diterapkan dalam dunia bisnis, strategi menggambarkan arah bisnis yang mengikuti lingkungan yang dipilih dan merupakan pedoman untuk mengalokasikan sumber daya dan usaha suatu organisasi. Menurut Jain setiap organisasi membutuhkan strategi manakala menghadapi situasi berikut:

- 1) Sumber daya yang dimiliki terbatas.
- 2) Ada ketidakpastian mengenai kekuatan bersaing organisasi.
- 3) Komitmen terhadap sumber daya tidak dapat diubah lagi.
- 4) Keputusan-keputusan harus dikoordinasikan antar bagian sepanjang waktu.
- 5) Ada ketidakpastian mengenai pengendalian inisiatif.¹⁵

¹⁵ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: ANDI, 2008), hlm. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara definisi strategi menurut beberapa ahli seperti yang diungkapkan oleh Chandler menyatakan bahwa “strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya”.

Menurut Porter yang menyatakan bahwa “strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Menurut Stephanie K. Marrus yang menyatakan bahwa “strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai”.

Menurut Hamel dan Prahalad yang menyatakan bahwa “strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti didalam bisnis yang dilakukan”.¹⁶

¹⁶ Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jenis-jenis Strategi

George A. Steiner mengatakan bahwa tidak ada klasifikasi atau pengelompokan strategi yang diterima secara umum. Hanya saja dapat dilakukan penggolongan menurut dimensi strateginya :

- a. Klasifikasi berdasarkan ruang lingkup yakni strategi dapat lebih luas atau lebih sempit sesuai dengan pemahaman. Contohnya seperti strategi program.
- b. Klasifikasi berdasarkan hubungan dengan tingkat organisasi yakni strategi yang berdasarkan pada jenjang setiap divisi yang memiliki strateginya masing-masing dan merupakan cabang dari strategi utama sebuah badan.
- c. Klasifikasi berdasarkan keterkaitan strategi dengan sumber material atau bukan material yakni dengan melihat bentuk fisik seperti SDM yang tersedia atau gaya manajemen, pola pikir atau falsafah perusahaan.
- d. Klasifikasi berdasarkan tujuan dan fungsi sebagai contoh pertumbuhan adalah sasaran utama dari kebanyakan perusahaan dan terdapat banyak strategi yang dipilih untuk menjamin pertumbuhan tersebut
- e. Klasifikasi berdasarkan strategi pribadi manajer. Semakin tinggi tingkat manajer, semakin penting artinya strategi ini bagi kehidupan organisasi.¹⁷

¹⁷ George A Steiner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1997), hlm. 15 – 16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Strategi Dalam Tinjauan Islam

Proses menyusun strategi pada masa Rasulullah juga sering kali digunakan untuk berdakwah dan memperluas kekuasaan atau bahkan berperang. Salah satu konsep strategi perang yang diketahui adalah kisah Khalid bin Walid Radhiyallahu ‘anhu yang pada saat itu sangat sadar, tidaklah mungkin menandingi pasukan sebesar pasukan Romawi tanpa siasat yang jitu. Ia lalu mengatur strategi, ditebarkan rasa takut ke diri musuh dengan selalu mengganti formasi pasukan setiap hari. Pasukan di barisan depan ditukar dibelakang, dan yang dibelakang berada didepan. Pasukan sayap kanan berganti posisi ke kiri begitupun sebaliknya.

Tujuannya adalah agar pasukan romawi mengira pasukan muslimin mendapat bantuan tambahan pasukan baru. Selain itu, khalid bin Walid mengulur-ulur waktu peperangan sampai sore hari karena menurut aturan peperangan pada waktu itu, peperangan tidak boleh dilakukan pada malam hari. Khalid memerintahkan beberapa kelompok prajurit kaum muslimin pada pagi harinya agar berjalan dari arah kejauhan menuju medan perang dengan menarik pelepah-pelepah pohon sehingga dari kejauhan terlihat seperti pasukan bantuan yang datang dengan membuat debu-debu berterbangan. Pasukan musuh yang menyaksikan peristiwa tersebut mengira bahwa pasukan muslim benar-benar mendapatkan bala bantuan. Mereka berpikir, bahwa kemarin dengan 3000 orang pasukan saja merasa kewalahan, apalagi jika



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

datang pasukan bantuan. Karena itu, pasukan musuh merasa takut dan akhirnya mengundurkan diri dari medan pertempuran.

Pasukan Islam lalu kembali ke Madinah, mereka tidak mengejar pasukan Romawi yang lari, karena dengan mundurnya pasukan Romawi berarti Islam sudah menang.

Dari kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung Islam telah mengajarkan umatnya untuk merangkai dan menjalankan sebuah strategi agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Begitu pula strategi dalam sebuah organisasi pada dasarnya dimaksudkan sebagai suatu proses (aktivitas) penentuan dan pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan empat fungsi dasar, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling dalam penggunaan sumberdaya organisasi. Karena itulah, aplikasi manajemen organisasi hakikatnya adalah juga amal perbuatan SDM organisasi yang bersangkutan.

Berkenaan dengan hal itu, Islam telah menggariskan bahwa hakikat amal perbuatan haruslah berorientasi bagi pencapaian ridha Allah SWT. Hal ini seperti yang dikatakan Allah dalam Qur'an surat Al Mulk ayat 2 sampai 3 yang mensyaratkan dipenuhinya dua syarat sekaligus, yaitu niat yang ikhlas dan cara yang harus sesuai dengan hukum syariat Islam. Bila perbuatan manusia memenuhi dua syarat itu sekaligus, maka amal itu tergolong ahsan (ahsanul amal), yakni amal terbaik di sisi Allah SWT.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, keberadaan manajemen organisasi dipandang pula sebagai suatu sarana untuk memudahkan implementasi Islam dalam kegiatan organisasi tersebut. Implementasi nilai-nilai Islam berwujud pada difungsikannya Islam sebagai kaidah berpikir dan kaidah amal dalam seluruh kegiatan organisasi. Nilai-nilai Islam inilah sesungguhnya nilai utama organisasi yang menjadi payung strategis hingga taktis seluruh aktivitas organisasi. Sebagai kaidah berpikir, aqidah dan syariah difungsikan sebagai asas atau landasan pola pikir dalam beraktivitas. Sedangkan sebagai kaidah amal, syariah difungsikan sebagai tolok ukur kegiatan. Tolok ukur syariah digunakan untuk membedakan aktivitas yang halal atau haram. Hanya kegiatan yang halal saja yang dilakukan oleh seorang muslim, sementara yang haram akan ditinggalkan semata mata untuk menggapai keridhoan Allah SWT.

Sebagai sebuah proses Islami, maka manajemen strategis bagi suatu organisasi akan dikendalikan oleh nilai-nilai transendental (aturan halal-haram), dari cara pengambilan keputusannya hingga pelaksanaannya sama sekali berbeda dengan aplikasi manajemen strategis konvensional yang non Islami.

Berbeda dengan landasan sekularisme yang bersandikan pada nilai-nilai material, aplikasi manajemen strategis non Islami tidak memperhatikan aturan halal-haram dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menyusun strategi jika dilihat dari perspektif Islam menekankan pada wilayah halal dan haram. Hal tersebut dapat dilihat pada prinsip-prinsip Islam mengenai halal dan haram, prinsip-prinsip tersebut diantaranya yaitu:

1. Segala sesuatu pada dasarnya boleh.
2. Untuk membuat absah dan untuk melarang adalah hak Allah semata.
3. Melarang yang halal dan membolehkan yang haram sama dengan syirik.
4. Larangan atas segala sesuatu didasarkan atas sifat najis dan melukai.
5. Apa yang halal adalah yang diperbolehkan, dan yang haram adalah yang dilarang.
6. Apa yang mendorong pada yang haram adalah juga haram.
7. Menganggap yang haram sebagai halal adalah dilarang.
8. Niat yang baik tidak membuat yang haram bisa diterima.
9. Hal-hal yang meragukan sebaiknya dihindari.
10. Yang haram terlarang bagi siapapun.
11. Keharusan menentukan adanya pengecualian.

Hal tersebut selaras dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menekankan bahwa tolak ukur strategi adalah hukum syara' tentang halal haram, hadist tersebut berbunyi :

“Tinggalkan olehmu sekalian apa saja yang telah ku tinggalkan. Sesungguhnya yang menyebabkan kebinasaan umat-umat sebelum adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyaknya pertanyaan mereka dan mereka bertindak tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka. Oleh karena itu, bila aku melarang sesuatu kepada kamu sekalian maka jauhilah, dan bila aku memerintahkan sesuatu maka kerjakanlah sekuat tenaga.”

Jadi, Islam telah menetapkan bagi manusia suatu tolok ukur untuk menilai segala sesuatu, sehingga dapat diketahui mana perbuatan yang terpuji (baik) yang harus segera dilaksanakan dan mana perbuatan tercela (buruk) yang harus segera ditinggalkan. Tolok ukur ini, adalah hukum syara’ yakni aturan-aturan Allah SWT. Yang dibawa oleh Rasul. Bukan akal dan nafsu manusia. Sehingga apabila ssyirik menilai perbuatan tersebut terpuji (baik), maka itulah terpuji (baik), sedangkan apabila syara’ menilai suatu perbuatan tercela (buruk) maka itulah tercela (buruk).

Tolak ukur ini bersifat abadi dan tidak berubah selama-lamanya. Karena itu perbuatan yang terpuji (baik) menurut syara’ seperti shalat, berakhlak mulia, menepati janji, berbuat baik kepada orang tua, melaksanakan jual beli dengan jalan yang halal, dan lain-lain tidak akan berubah menjadi perbuatan yang tercela (buruk). Hal tersebut dapat digunakan dalam menyusun strategi yang bertujuan untuk menggapai visi, misi dan tujuan organisasi harus melihat prinsip-prinsip halal haram tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

agar tujuan organisasi tidak hanya demi menggapai orientasi materi tetapi juga demi menggapai ridho Allah pada setiap prosesnya.¹⁸

B. Pedagang Kaki lima (PKL)

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penaja dagangan yang menggunakan gerobak. Secara “etimologi” atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan dari barang tersebut. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap.

Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap. Sedangkan menurut kamus umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) dimuka pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di jaman silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan dari

¹⁸ Muhammad Ismail Yusmanto. *Manajemen Strategis Perspektif Syariah*. (Jakarta : Penerbit Khairul Bayan, 2003) , hlm. 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima dimasyarakatkan.¹⁹

Pedagang kaki lima merupakan salah satu jenis perdagangan dalam sektor informal, yakni operator usaha kecil yang menjual makanan, barang dan atau jasa yang melibatkan ekonomi uang dan transaksi pasar, hal ini sering disebut dengan sektor informal perkotaan Ciri-ciri umum pedagang kaki lima lebih lanjut dijelaskan oleh Kartono dkk sebagai berikut²⁰:

- a. Kelompok pedagang yang kadang sekaligus menjadi produsen, yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri.
- b. Pedagang kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya mejual dagangannya di atas tikar di pinggir jalan, di depan toko, maupun dengan menggunakan grobak dorongan kecil dan kios kecil.
- c. Pedagang kaki lima umumnya menjual dagangannya secara eceran
- d. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil
- e. Kualitas dagangan yang dijual relatif rendah, bahkan ada pedagang yang khusus menjual barang cacat dengan harga sangat rendah.

¹⁹ Pedagang_Kaki_Lim, diakses pada tanggal 11 Desember 2018 pukul 14.33 dari <https://www.academia.edu/11397299/>

²⁰ Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, (Surabaya: ITS press), hlm. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Omzet penjualan pedagang kaki lima tidak besar dan cenderung tidak menentu.
- g. Para pembeli umumnya berdaya beli rendah.
- h. Umumnya pedagang kaki lima merupakan usaha “family enterprise”, artinya anggota keluarga juga turut membantu dalam usaha tersebut.
- i. Mempunyai sifat “one man enterprise”, yaitu usaha yang hanya dijalankan oleh satu orang.
- j. Memiliki ciri khas yaitu terdapat sistem tawar-menawar antara pembeli dan pedagang
- k. Sebagian Pedagang Kaki Lima melakukan usahanya secara musiman, sering kali jenis dagangannya berubah-ubah.
- l. Pedagang Kaki Lima umumnya menjual barang yang umum, jarang menjual barang yang khusus.
- m. Anggapan bahwa para Pedagang Kaki Lima ini merupakan kelompok yang menduduki status sosial terendah dalam masyarakat.
- n. Pedagang Kaki Lima tidak memiliki jam kerja yang tetap
- o. Pedagang Kaki Lima memiliki jiwa “entrepreneurship” yang tinggi.

2. Jenis-jenis dan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima

Dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dapat dilihat bahwa jenis tempat usaha Pedagang Kaki Lima terbagi atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan bergerak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dapat dilihat pembagian jenis tempat usaha secara terperinci, yaitu dalam ayat (1) ditentukan bahwa jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 antara lain gelaran, lesehan, tenda dan selter. Dalam ayat (2) ditentukan bahwa jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 antara lain tidak bermotor dan bermotor.

Penjelasan mengenai jenis tempat usaha Pedagang Kaki Lima sebagai berikut:

- a. Gelaran/Alas, pedagang menggunakan alas tikar, kain atau sejenisnya untuk menjajakan dagangannya.
- b. Lesehan, pedagang menggunakan tikar atau lantai untuk memperjualbelikan dagangannya dan konsumen juga ikut menggunakan tikar untuk duduk.
- c. Tenda, pedagang menggunakan tempat berlindung dari kain atau bahan lainnya untuk menutupi yang melekat pada kerangka tiang atau dengan tali pendukung.
- d. Selter, bentuk sarana ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bilik, yang mana pedagang tersebut juga tinggal didalamnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Tidak bermotor, biasanya pedagang menggunakan gerobak/kereta dorong yang digunakan untuk berjualan makanan, minuman, atau rokok.
- f. Bermotor, pedagang menggunakan kendaraan baik beroda dua, tiga, atau empat untuk menggunakan barang dagangannya.

2. Pedagang Kaki Lima Dalam Ekonomi Islam

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu bentuk usaha yang mempunyai jiwa kewirausahaan yang tinggi dan mampu bersaing di tengah persaingan perekonomian. Keberadaan PKL cenderung dilatar belakangi persoalan minimnya lapangan pekerjaan yang di sediakan oleh pemerintah, upaya bertahan hidup, minimnya modal usaha disektor formal, aturan dan birokrasi yang rumit, pekerjaan sementara dan faktor keturunan serta profesi, menjadikan usaha PKL sebagai salah satu alternative yang dapat di lakukan oleh masyarakat. PKL atau dalam bahasa inggris disebut juga street trader selalu dimasukkan dalam sektor informal. PKL adalah orang yang berdagang menggunakan gerobak atau menggelar dagangannya di pinggir-pinggir jalan atau trotoar jalan kota di sekitar pusat perbelanjaan/pertokoan, pasar, pusat rekreasi/hiburan, pusat perkantoran dan pusat pendidikan, baik secara menetap atau setengah menetap, berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam hari dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dengan tidak melibatkan pihak lain secara terikat. Istilah pedagang kaki lima pertama kali dikenal pada zaman Hindia Belanda, tepatnya pada saat Gubernur Jenderal Stanford Raffles berkuasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Perkembangan pedagang kaki lima dalam lintas sejarah perekonomian umat manusia mengalami kemajuan dan kemoderenan. Ketidakpuasan dengan kebijakan pemerintah terkait pengalokasian para pelaku PKL, melahirkan pedagang yang turun ke masyarakat secara langsung, yang disebut dengan pasar kaget. Padangan Islam terhadap PKL adalah sebagai wujud berekerja keras, namun dalam pelaksanaan perdagangan PKL mesti mematuhi symbol-symbol syariat, mislanya jujur, amanah, tidak menipu dan menepati janji. Berkaitan dengan pemimpin atau penguasa, maka Islam memandang PKL dibenarkan jika ada kesepakatan dengan pemerintah dan tidak mengganggu kepentingan umum yang lebih maslahat.²¹

3. Peran Pemerintah Dalam Kebijakan Ekonomi Dalam Prespektif Islam

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syari'ah yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis serta dilengkapi dengan ijma' dan qiyas. Sistem perekonomian Islam, saat ini lebih dikenal dengan istilah sistem ekonomi syari'ah. Sistem ekonomi syari'ah mempunyai beberapa tujuan, yakni:

1. Pertama, kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam.

²¹ Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 1(1), 52-71. <https://doi.org/10.33367/at.v1i1.739>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kedua, membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal.
3. Ketiga, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
4. Keempat, menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.²²

Salah satu teori ekonomi syari'ah yang dikembangkan oleh ahli pemikir Islam, Ibnu Khaldun, berupa sebuah rumusan berupa kebijaksanaan politik pembangun, mungkin, dapat diaplikasikan dalam perkembangan Ilmu Ekonomi Islam saat ini. Rumusan Ibnu Khaldun tersebut dikenal sebagai "*dynamic model of Islam*" atau model dinamika.²³ Model dinamika adalah sebuah rumusan yang terdiri dari delapan prinsip kebijaksanaan politik yang terkait dengan prinsip yang lain secara interdisipliner dalam membentuk kekuatan bersama dalam satu lingkaran sehingga awal dan akhir lingkaran tersebut tidak dapat dibedakan, terdiri atas:

- 1) Kekuatan Pemerintah tidak dapat diwujudkan kecuali dengan implementasi Syari'ah
- 2) Syari'ah tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan pemerintahan;
- 3) Pemerintah tidak dapat memperoleh kekuasaan kecuali dari rakyat;
- 4) Masyarakat tidak dapat ditopang kecuali oleh kekayaan;

²² Taqyiddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 268

²³ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dari pembangunan;
- 6) Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan;
- 7) Keadilan merupakan standar yang akan dievaluasi Allah pada umatNya; pemerintah dibebankan dengan adanya tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan.²⁴

Masyarakat dalam sebuah pemerintahan sesuai kodratnya merupakan manusia yang lebih suka hidup secara bersama. Hal ini disebabkan dengan kapasitas individu yang ada, manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok guna mempertahankan kehidupan mereka dalam masyarakat. Oleh karena itu, mereka sangat membutuhkan suasana kehidupan yang saling menolong dan bekerjasama. Akan tetapi, mereka tidak dapat hidup berdampingan dan bekerjasama dengan yang lain dalam suasana penuh konflik dan permusuhan serta ketidakadilan. Untuk itu diperlukan adanya sebuah "rasa kebersamaan" dan "pemerintah" sebagai pengendali kekuasaan untuk mencegah terjadinya konflik dan ketidakadilan guna mempersatukan mereka.

Dalam ajaran *welfare state* Islami, mengupayakan agar setiap orang mengikuti ajaran syari'ah dalam urusan duniawi mereka merupakan hal yang penting. Negara harus tetap mengawasi semua tingkah laku yang dapat membahayakan pembangunan social ekonomi seperti ketidakjujuran, penipuan, dan ketidakadilan sebagai prasyarat kualitas yang dibutuhkan untuk

²⁴ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keharmonisan sosial dan pembangunan berdasarkan keadilan. Selain itu, negara harus menjamin pemenuhan hukum dan menghormati hak milik individu serta menanamkan kesadaran kepada seluruh lapisan masyarakat.

Apabila pemerintah melaksanakan peranannya secara efektif, maka akan menjadi sebuah kontribusi positif dalam pembangunan karena kebutuhan masyarakat akan terpenuhi, sehingga mereka akan termotivasi melalui kerja keras yang cermat dan efisien. Namun, jika hal itu tidak terlaksana, maka yang terjadi adalah kehancuran. Sumber daya yang dibutuhkan negara untuk kepentingan itu, diperoleh melalui sistem pajak yang adil dan efisien. Di samping itu, perlu dicermati bahwa apabila, jika pemerintah tidak menerapkan nilai-nilai syari'ah secara efisien, maka tidak akan ada keadilan. Jika tidak ada keadilan, maka "rasa kebersamaan" tidak akan ada, dan jika tidak ada "rasa kebersamaan", maka tidak akan ada lingkungan yang mendukung terlaksananya implementasi syari'ah, hukum dan perundang-undangan, pembangunan dan kemakmuran. Ketiadaan semua itu, akan membuat administrasi pemerintah menjadi lemah dan tidak efektif.

Konsep Ibnu Khaldun dalam "Model Dinamika" menyatakan bahwa negara harus berorientasi kepada kesejahteraan rakyat, memiliki kebijakan anggaran, menghargai hak milik masyarakat, dan menghindari pungutan pajak yang memberatkan. Negara akan mengutamakan pembangunan melalui anggaran yang dihasilkan dari kebijakan yang adil, dan sebaliknya negara akan menghambat pembangunan dengan memperlakukan sistem pajak dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan yang tidak adil. Negara merupakan suatu pasar terbesar yang dihasilkan dari anggaran negara tersebut untuk kesejahteraan rakyatnya. Untuk itu, negara tidak perlu terlibat secara langsung sebagai pelaku pasar, namun harus melakukan hal-hal yang dapat membantu masyarakat menjalankan usaha mereka secara lebih efisien dan mencegah masyarakat untuk melakukan tindakan yang tidak adil secara berlebihan.

Menurut David C. Korten dan Joseph E. Stiglitz, sebagaimana dikutip oleh Zain, pasar yang berhasil mensyaratkan adanya keseimbangan peran antara Pemerintah dan pasar.²⁵ Keseimbangan tersebut mungkin berbeda dari satu negara dengan negara lain dan dari waktu ke waktu, juga antara satu sektor dengan sektor lainnya, serta dari satu masalah dengan masalah lain. Tercapainya keseimbangan itu mensyaratkan adanya kejelasan mengenai apa yang harus dilakukan oleh masing-masing dan bagaimana cara melakukannya. Intervensi Pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan publik juga diperhatikan. Namun keadaan sebaliknya terjadi pada saat ini. Era ekonomi baru dengan rezim perdagangan bebas, mengharuskan minimalisasi peran Pemerintah suatu negara dalam mengatur perekonomian suatu negara.

Kebijakan-kebijakan Pemerintah yang ikut campur dalam perekonomian dianggap telah menghambat pasar bahkan laju perekonomian.

²⁵ Zain, Samih Athif, 1988, *Syari'at Islam dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan*, Hussaini, Bandung, Cet I., hlm. 89.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, deregulasi dianggap sebuah kewajiban bagi rezim perdagangan bebas. Para penyokong rezim perdagangan bebas, mempromosikan, mengurangi regulasi berarti membiarkan kekuatan pasar bekerja. Kekuatan pasar akan menghasilkan lebih banyak efisiensi. Manfaat kekuatan pasar, melalui kompetisi, akan mengalir langsung ke konsumen dan masyarakat luas. Dengan demikian, menurut mereka, perlu dilakukan deregulasi-deregulasi perekonomian, termasuk sektor-sektor strategis yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Deregulasi-deregulasi yang dilakukan secara otomatis mengurangi peran Pemerintah dalam mengatur perekonomian yang dibutuhkan oleh semua golongan. Pihak yang diuntungkan terutama golongan pemilik modal atau eksekutif korporasi global. Para penganjur deregulasi, yakin bahwa semakin ramping Pemerintahan dan semakin rendah tarif pajak akan semakin baik bagi perekonomian. Menurut mereka, uang yang dibelanjakan oleh Pemerintah umumnya terbuang mubazir, sedangkan jika digunakan oleh sektor swasta akan termanfaatkan dengan baik. Pandangan yang menyetujui peran minimalis pemerintah didasari oleh sebuah ideologi simplistic yang dikenal sebagai "fundamentalisme pasar".²⁶ Secara umum ideologi ini menyatakan bahwa pasar dengan sendirinya stabil dan efisien. Akan tetapi ideologi tersebut tanpa landasan teori ekonomi yang dapat diterima. Pasar

²⁶ Paul Heinz Koesters, *Tokoh-tokoh Ekonomi Mengubah Dunia; Pemikiran-pemikiran yang Mempengaruhi Hidup Kita*, (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 78.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang stabil dan efisien akan terwujud, menurut teori, jika ada informasi yang sempurna, kompetisi sempurna, pasar yang lengkap, dan lainnya yang tidak pernah ada di negara paling maju sekalipun. Kenyataan yang terjadi, adalah, pasar seringkali tidak berjalan baik. Pasar sering menyebabkan terjadinya pengangguran. Pasar tidak bisa dengan sendirinya memberikan jaminan terhadap berbagai risiko penting yang dihadapi perorangan, termasuk risiko menganggur.

Pasar adalah alat untuk meraih tujuan, terutama, standar hidup yang lebih tinggi. Pasar bukanlah tujuan itu sendiri, sehingga langkah-langkah kebijakan yang digencarkan seperti privatisasi dan liberalisasi, janganlah dipandang sebagai tujuan, melainkan sebagai alat. Meskipun tujuan pasar itu sempit (hanya menyangkut kesejahteraan material, bukan nilai-nilai keadilan sosial), pasar bebas seringkali gagal mencapai tujuan-tujuan yang sempit sekalipun. Era 1990-an menunjukkan pasar tidak bisa menjamin stabilitas, sementara pada era 1970-an dan 1980-an, pasar tidak bisa menimbulkan pertumbuhan tinggi, bahkan kemiskinan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Awal-awal millennium, menunjukkan kondisi bahwa pasar bukan hanya tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai untuk menampung pendatang baru dalam angkatan kerja. Namun lebih dari yaitu, yakni juga tidak mampu mengimbangi berkurangnya pekerjaan yang ada akibat meningkatnya produktivitas. Pengangguran menunjukkan

kegagalan pasar yang paling dramatis sebab menjadikan sumber daya yang paling berharga menjadi mubazir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian diatas, kajian strategi pemerintah dalam penertiban usaha pedagang kaki lima di kecamatan tampan di kota pekanbaru dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penertiban kegiatan PKL Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP Kota Pekanbaru yaitu melalui proses perencanaan, pengelompokkan, pengarahaan, pengawasan dan evaluasi atau tindakan.
2. Strategi yang di lakukan pemerintah dalam penertiban PKL di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yaitu dengan melakukan strategi pembinaan, penertiban dan sanksi. Dengan adanya Strategi pemerintah ini dapat membantu pedagang kaki lima membuatnya lebih menjalankan aturan yang telah di tetapkan, sehingga terciptanya keadaan yang nyaman dan tentram.
3. Tinjauan ekonomi syariah tentang pelaksanaan penertiban PKL di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ialah menurut Islam. Strategi pemerintah dalam penertiban PKL sudah sesuai dengan syariat Islam. Karena pemerintah merupakan pelayan, pelindung dan pengayom bagi masyarakat serta dituntut bersikap baik dan lembut dalam melayani



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya, namun perlu disiplinkan dalam aspek pengawasan bagi PKL yang tidak mematuhi aturan yang berlaku.

B. Saran

Dari pemaparan diatas, ada beberapa saran yang menurut penulis perlu pertimbanganoleh berbagai pihak, yaitu:

1. Kepada pemerintah dan instansi terkait supaya lebih meningkatkan perannya terhadap penertiban PKL di Jl. Tobek Gadang.
2. Kepada pedagang kaki lima di Jl, Tobek Gadan hendaklah mereka lebih mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan tidak melanggarnya.
3. Kepada peneliti selanjutnya dianjurkan untuk meneliti lebih focus pada strategi pemerintah dalam penertiban PKL di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Solihin, Ismail. 1996, *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Dharmansyah. 1994, *Morfologi dan Sintaksis Bahasa Bedayuh*. Jakarta: depdikbud.
- Ismayani, Ade. 2014, *Metodologi Penelitian*. Banda Aceh : Syiah Kuala Univ Express.
- Sarwono, J. 2013, *Pintar Menulis Ilmiah*. Pekanbaru : Penerbit Andi.
- Hasyim Hasanah. 2016. Teknik-Teknik Observasi. Jurnal at-Taqaddum. 8(1): 26.
- Umar, Husein. 2010, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tjiptono Fandy. 2008, *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: ANDI.
- An-Nabhani, Taqyiddin.1996, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Samih Athif, Zain.1988, *Syari'at Islam dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan*, Bandung
- Koester Heinz Paul.1987. *Tokoh-tokoh Ekonomi Mengubah Dunia; Pemikiran-pemikiran yang Mempengaruhi Hidup Kita*, Jakarta: Gramedia.
- Kartini, Kartono. 2006, *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- George A Steiner. 1997, *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Badroeb, Faisal. 2006, *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Kencana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Muhammad Ismail Yusmanto.2003, *Manajemen Strategis Perspektif Syariah*.

Khairul Bayan. Jakarta

Mulia, Musdah. 2001, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haykal*. Jakarta: Paramidana.

Musa, M. Yusuf.1992. *Politik dan Negara Islam Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash.

Dewi, Khairina Afriani Candra. 2010 “*strategi bisnis pada pedagang kaki lima (pkl) di taman Bungkul Surabaya*” . Skripsi. FASEH, Ekonomi Syariah, Universitas Sultan Sarif Qasim, Riau.

Ines, Amalia Dinata, 2020 “*strategi pemerintah dalam penertiban usaha pedagang kaki lima di Kecamatan Tampan Pekanbaru*”. Skripsi FASEH, Ekonomi Syariah Universitas Sultan Sarif Qasim, Riau.

Kota Pekanbaru. 2015. Undang-Undang Peraturan Wali Kota No.11 Tahun 2015 Tentang Peraturan dan Perbedayaan Pedagang Kaki Lima

Kota Pekanbaru. 2002. Peraturan Daerah no.5 Tahun 2002 Tentang Program Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Republik Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah no. 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 2014, Sekretariat Negara. Jakarta.

Referensi Internet :

<http://eprints.umm.ac.id/46319/3/BAB%20II.pdf>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://mujibsite.wordpress.com/2009/08/14/sejarah-kaki-lima-pkl,diaksespada>

tanggal 10 januari 2018

<https://www.riau.go.id/home/content/4/kota-pekanbaru>



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah ada permasalahan dalam penertiban pedagan kaki lima di Jl. Tobek Gadang ?
2. Apa lang-langkah yang diambil oleh Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jl.Tobek Gadang ?
3. Bagaimana pelaksanaan penertiban dilapangan ?
4. Apa kendala yang didapatkan Satpol PP saat melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima(PKL) di lapangan ?
5. Apa sanksi yang diberikan terhadap pkl yang tidak mematuhi tata tertib ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ANGKET PENELITIAN

Responden yang terhormat

Melalui angket ini, penelitian mohon bantuan kepada bapak/ibu/saudari/i untuk mengisi angket penelitian ini sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman.

Jawaban yang bapak/ibu/saudara/i berikan dijamin kerahasiaan dan tidak akan mempengaruhi aktivitas bapak/saudara/i karena angket ini semata-mata untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir dengan judul : **STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAKN TAMPAN KOTA PEKANBARU MENURUT PRESFEKTIF EKONOMI SYARIAH.**

Angket ini ditujukan kepada pedagang kaki lima di Jl. Tobek Gadang. Atas bantuan bapak/ibu/saudara/i dalam pengisian angket ini saya ucapkan terima kasih.

A. Identitas Responden

Nama :
Jenis kelamin :
Umur :
Pedagang :

B. Pentunjuk Pengisian

Mohon bapak/ibu/saudara/i untuk mengisi jawaban pada pilihan yang telah tersedia dan member tanda (X) untuk jawaban yang dipilih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang strategi pemerintah ?
 - a. Sangat memuaskan
 - b. Cukup memuaskan
2. Bagaimanakah keadaan strategi pelaksanaan penertiban terhadap pedagang kaki lima menurut Bapak/Ibu oleh Pemerintah (Satpol PP)?
 - a. Sudah dilakukan penertiban
 - b. Belum dilakukan penertiban
3. Bagaimana tata cara yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima menurut Bapak/Ibu?
 - a. Menertibkan dengan baik
 - b. Menertibkan dengan paksa
4. Apakah Bapak/Ibu sudah menerima sanksi atau tidak terhadap pedagang kaki lima yang di anggap tidak tertib dan teratur ?
 - a. Sudah menerima sanksi
 - b. Belum menerima sanksi

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **"STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH"**, yang ditulis oleh:

Nama : Ines Amalia Dinata
NIM : 11720525309
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, M.Ag

Sekretaris
Madona Khairunnisa, S.E.I., M.E.Sy

Penguji I
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Penguji II
Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh

Mengetahui:
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah Dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 29 Januari 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1541/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

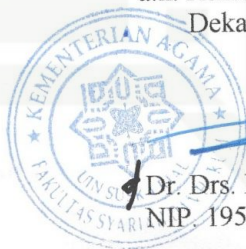
Nama : INES AMALIA DINATA
NIM : 11720525309
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Jln. Tobek Gadang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang
berjudul : Strategi Pemerintah dalam Penertiban Usaha Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan
Kota Pekanbaru Menurut Presfektif Ekonomi Syariah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

embusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU
Z. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
b. mengutip, hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah.
UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38440
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/1541/2021 Tanggal 29 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

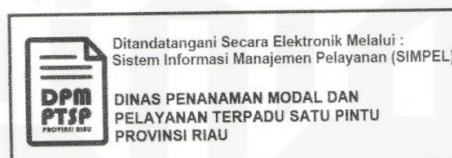
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | INES AMALIA DINATA |
| 2. NIM / KTP | : | 11720525309 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | JL. TOBEK GADANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 5 Februari 2021



Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Dilarang mengutip atau menyalin seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/1187/2021



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/38440 tanggal 5 Februari 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : INES AMALIA DINATA
2. NIM : 11720525309
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : EKONOMI SYARIAH
5. Jenjang : S1
6. Alamat : KEBUH TENGAH DESA EMPAT BALAI KEC. KUOK-KAMPAR
7. Judul Penelitian : STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
8. Lokasi Penelitian : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaitan sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 7 April 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru

ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

suatu masalah.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : INES AMALIA DINATA
NIM : 11720525309
JURUSAN : EKONOMI SYARIAH
JUDUL : STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Pembimbing: Dr.Nurnasrina, SE, M.Si

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 22 Juli 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

RIWAYAT HIDUP PENULIS



INES AMALIA DINATA biasa di panggil Ines lahir di Kuok, 23 Oktober 1998, anak ketiga dari empat bersaudara dan merupakan anak dari pasangan Bapak Irwan Karta Dinata dan Ibu Uun Kurniasih. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 002 Terpadu Kuok pada tahun 2005 sampai tahun 2011. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Kuok dan menyelesaikannya tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Keatas (SMA) di SMA Negeri 1 Salo yang selesai pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur Mandiri, dan penulis diterima di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Pada bulan Januari 2019, penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di BANK RIAU KEPRI.

Pada bulan Juli sampai Agustus 2020 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata di Desa Empat Balai, Kecamatan kuok, Kabupaten Kampar Kemudian penulis melakukan penelitian dengan judul “ Strategi Pemerinta Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Menurut Presfektif Ekonomi Syariah”. Akhirnya tepat pada hari senin pada tanggal 30 Juni 2021 di Munaqasahkan dalam sidang Panitia Ujian Sarjana (S1) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.